

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan kunci utama bagi kemajuan dan perkembangan suatu negara baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil dan optimal jika potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Pengelolaan dapat dilakukan dengan kolaborasi peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dikelola dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya penunjang. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan suatu daerah agar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Pariwisata menjadi salah satu aspek yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih secara langsung pada pendapatan daerah dimana objek wisata tersebut berada¹. Kedudukan pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta

¹ Meiwany A. K. Tapatfeto dan Juita L. D Bessie. 2018. Strategi Pengembangan Objek Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kunjungan. *Jurnal of Management* Vol.6, No.1-2

masuknya investasi ke berbagai wilayah Nusantara. Dengan pengelolaan pariwisata secara bijaksana dan berkelanjutan, suatu negara dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan sosialnya secara maksimal seiring dengan pelestarian sumber daya alam dan warisan budaya untuk kepentingan generasi masa depan.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan dari berbagai sisi termasuk pariwisata. Bukti serius pemerintah dalam menanggapi pentingnya pembangunan pariwisata adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional².

Kabupaten/kota di Indonesia sudah banyak yang menggunakan prinsip-prinsip kolaboratif dalam pembangunan pariwisatanya, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah tujuan wisata yang menjadi destinasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kawasan wisata Lembah Harau yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Menghadapai perubahan dan tantangan dalam konteks global maupun regional, diperlukan perencanaan yang terpadu serta komperhensif mencakup seluruh komponen dalam pembangunan kepariwisataan, baik dari segi pengembangan destinasi, metode pemasaran, pengelolaan industri serta penguatan kelembagaan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. 2009.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, kawasan wisata Lembah Harau termasuk kedalam salah satu destinasi wisata unggulan yang akan dikembangkan dalam program pengembangan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga swasta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Lima Puluh Kota, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032 termasuk destinasi utama pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana wisata alam Lembah Harau termasuk wilayah destinasi utama pariwisata kabupaten³. Berikut data jumlah kunjungan destinasi utama wisata unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1. 1

**Jumlah Kunjungan Destinasi Wisata Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022-2023**

Destinasi Wisata Unggulan	Jumlah Kunjungan Wisata	
	2022	2023
Lembah Harau	270.737	281.366
Kapalo Banda Taram	232.696	266.746
Pemandian Batang Tabit	218.335	50.244
Pusako Rumah Gadang	27.311	31.868

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

³ Bupati Lima Puluh Kota, *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7. 2016.*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat perbandingan jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata unggulan 2 (dua) tahun terakhir. Objek wisata Lembah Harau pada dua tahun perbandingan tersebut tetap menjadi objek wisata dengan jumlah kunjungan wisata terbanyak dibanding dengan ketiga wisata lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa objek wisata Lembah Harau masih terus mempertahankan posisinya sebagai tempat kunjungan utama para wisatwan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data kunjungan wisatawan kabupaten/kota Tahun 2021-2023 bukan merupakan kabupaten dengan jumlah kunjungan wisata terbanyak, namun Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam 3 (tiga) besar kabupaten dengan kunjungan wisatawan terbanyak pada Tahun 2021-2023 di Provinsi Sumatera Barat⁴. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih mampu untuk bersaing dengan daerah lainnya terutama dalam sektor pariwisata yang ada di Sumatera Barat jika terus dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Lembah Harau didukung oleh beberapa faktor penunjang lainnya yang memegang peranan vital untuk menentukan keberhasilan dalam pembangunan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan pengelolaan yang baik akan menghasilkan perkembangan yang baik terhadap objek

⁴ Badan Pusat Statistik, Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata (DTW) Berbayar Menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2021-2023, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/16/312/1/kunjungan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

wisata sehingga juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tingkat kepedulian masyarakat terhadap objek wisata dalam rangka menjaga dari berbagai kerusakan juga akan meningkat.

Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil meraih penghargaan ISTA (*Indonesia Sustainable Tourism Award*) pada Tahun 2018 melalui objek wisata Lembah Harau⁵. Penghargaan ISTA dimaksudkan untuk mendorong para pengelola destinasi agar lebih memahami menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Lembah Harau berhasil mengukir prestasi sebagai destinasi wisata tunggal dari Sumatera barat yang dianugrahi penghargaan oleh Menteri Pariwisata pada Tahun 2018. Keberhasilan dalam melestarikan Lembah Harau secara berkelanjutan mengantarkan Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh status sebagai salah satu kawasan Pamong Berkelanjutan melalui penghargaan tersebut.

Gambar 1. 1

Penyerahan Penghargaan ISTA dari Kementerian Pariwisata



Sumber : Minang Terkini.2018

⁵ Beritasumbar.com. 2 Desember 2018. "Limapuluh Kota Terima Penghargaan ISTA 2018," *Redaksi*. <https://beritasumbar.com/limapuluh-kota-terima-penghargaan-ista-2018/>

Lembah Harau menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selama periode Tahun 2015-2019, objek wisata Lembah Harau memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu mencapai Rp.2.511.825.000. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, total penerimaan kontribusi dari objek wisata terhadap PAD Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki persentase rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 59,86%⁶. Ini menunjukkan objek wisata sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dari itu pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan jumlah kunjungan terhadap objek wisata.

Pemerintah perlu mengembangkan serta memperkenalkan berbagai produk wisata baru untuk mengatasi penurunan jumlah pengunjung serta mengurangi kejenuhan terhadap suatu objek wisata. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat jumlah kunjungan objek wisata Lembah Harau pada Tahun 2019-2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Pengunjung Objek Wisata Lembah Harau

Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Keseluruhan	Persentase Perbandingan	
				Wisnu	Wisman
2019	377.204	6.833	384.037	98,2%	1,8%
2020	379.325	602	379.927	99,8%	0,2%
2021	226.857	0	226.857	100%	0%

⁶ Anita, R. S. and Suasti, Yurni. 2021. Kontribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Buana*. Vol 5, no. 5.

2022	270.737	0	270.737	100%	0%
2023	281.486	0	281.486	100%	0%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari Tahun 2019 sampai 2023 wisatawan mancanegara objek wisata Lembah Harau menunjukkan tren penurunan drastis hingga mencapai nol pada Tahun 2021-2023. Sebaliknya, jumlah wisatawan nusantara tetap cukup stabil dalam rentang tahun yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah guna memutus penyebaran Virus Corona.

Kawasan wisata Lembah Harau merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya agar tidak terjadi penurunan jumlah pengunjung. Jika pengunjung kawasan wisata Lembah Harau meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika pengunjung kawasan wisata Lembah Harau menurun, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota juga akan ikut menurun.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Lembah Harau memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi tidak hanya sebatas pembuatan peraturan namun juga sampai pada tahap mengidentifikasi data, penyusunan

rencana kerja serta pelaksanaannya, termasuk pemantauan dan evaluasi semua aktor kebijakan ikut terlibat dan berada dalam satu garis tujuan yang sama.

Gambar 1.2

Wilayah Lembah Harau



Sumber: *Wisato.id*, 2023

Pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan beberapa *stakeholder* yang berasal dari instansi pemerintah daerah, pihak swasta, pemangku masyarakat dan masyarakat setempat⁷. *Stakeholder* terkait tentu memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan wisata Lembah Harau saat ini dikelola oleh beberapa aktor namun masih dibawah pembinaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁷ Yusman, Deki. dkk. 2021. Manajemen Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Menara Ilmu*. Vol. XV, No.01

Aturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan kolaborasi pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2022 Tentang penetapan nagari wisata, yang mana Lembah Harau merupakan salah satu dari nagari wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal inilah yang menjadi dasar bagi *stakeholder* yang terlibat dengan pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau dalam menjalankan kolaborasi.

Keterlibatan aktor dalam pengelolaan wisata Lembah Harau merupakan kerjasama antar pemerintah daerah. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan *leading sector* dalam pengelolaan Lembah Harau sebagai destinasi utama pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan dinas lainnya dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau. Hal tersebut disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Ada beberapa dinas terkait yang berhubungan dengan itu, salah satunya ada PUPR nya untuk sarana jalan, untuk parkirnya itu Dinas Perhubungan, untuk pengamanannya itu ada dari Satpol PP, nah trus ada untuk ekonomi kreatifnya ada Dinas Koperindag, kebersihan lingkungannya ada LH, jadi kita saling bersinergi dan berkolaborasi disini *stakeholder* yang ada terkait dengan kepariwisataan itu tapi Dinas Pariwisata yang sebagai *leading sector* nya.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Nopi Rita, pada hari Senin 3 Juni 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut pemerintah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan beberapa dinas terkait agar pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau dapat berjalan dengan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga menjadi sektor pemimpin dalam pengelolaan wisata Lembah Harau.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dan pedagang serta memberikan pelatihan kepada kelompok sadar wisata terkait cara meng *handle* tamu, mewujudkan nilai sakta pesona, bagaimana pengelolaan homestay, dan lain sebagainya. Selain itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga berperan dalam mempromosikan objek wisata.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau. Adapun peran BKSDA adalah dalam bidang konservasi dikarenakan objek terbesar di Lembah Harau adalah hutan konservasi, maka BKSDA terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau agar kawasan konservasi tetap terjaga kedepannya. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyampaikan bahwa:

“Kolaborasi kalau dengan BKSDA itu memang dalam tata kelola yang menjadi kewenangan ada asset Pemda yang kita kelola tapi juga terhubung dengan BKSDA seperti memberikan informasi bahwa konservasinya tetap terjaga, selain itu objek wisata terbesar di harau itu adalah hutan konservasi atau hutan lindung dan itu merupakan kepemilikan BKSDA.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Syukri Anda, pada 3 Juni 2024)

Pengelolaan yang baik tentu tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai, dengan demikian Pemda berkolaborasi dengan pihak swasta yang berperan sebagai investor dalam kawasan wisata Lembah Harau

ini. Peran pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pengembangan kawasan wisata seperti pembangunan *homestay*, resto, dan wahana. Dengan adanya fasilitas pendukung tersebut akan meningkatkan daya tarik kawasan wisata serta dapat juga meningkatkan jumlah kunjungan terhadap suatu kawasan wisata. Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan setiap tahunnya terdapat peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sehingga juga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata Lembah Harau. Dengan hal itu mengundang pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan wisata Lembah Harau yang dapat dibuktikan dengan pembangunan hotel/penginapan di kawasan wisata Lembah Harau semakin tidak terkendali, serta pembangunan wahana yang semakin banyak di kawasan wisata Lembah Harau. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota:

“Kalau pihak swasta nya dia sebagai investor disitu, dia punya wahana pribadi karena kan lahan kita ada lahan masyarakat juga, nah lahan masyarakat yang dibeli oleh investor atau yang dikelola oleh investor itulah yang pihak ke tiga itu yang dikatakan sebagai swasta”. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Nopi Rita, pada 3 Juni 2024)

Masyarakat juga ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau. Masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan ini dikumpulkan dan membentuk suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di kawasan wisata. Selain itu, pokdarwis juga berperan dalam mengembangkan dan memberikan pengalaman kepada wisatawan yang berkunjung

berdasarkan warisan budaya tak-benda yang ada di kawasan wisata yang mana warisan tersebut dikembangkan dan dikelola bersama masyarakat.

Secara umum, aktor dalam *collaborative governance* dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) sektor utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sektor pemerintah mencakup semua tingkatan administrasi mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah tingkat daerah. Sektor swasta terdiri dari pengusaha atau pelaku industri pariwisata yang terlibat langsung dalam sektor tersebut. Sektor masyarakat melibatkan kelompok sadar wisata, tokoh masyarakat, intelektual, dan LSM yang berperan sebagai penggerak serta pendukung utama dalam bidang pariwisata.

Dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau pihak yang berkolaborasi antara lain pemerintah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian pihak swasta yaitu pengusaha, pemilik homestay dan wisata buatan yang ada di lembah harau. Selain itu, masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lestari Aka Barayun dan Sarbun. Dapat dilihat bahwa hal tersebut merupakan keikutsertaan beberapa aktor dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Lembah Harau.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, permasalahan yang muncul akibat dari kolaborasi yang belum optimal dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau adalah partisipasi dalam kolaborasi. Pengelolaan pintu

masuk objek wisata lembah harau saat ini dikelola oleh masyarakat setempat bersama dengan Tenaga Harian Lepas (THL) dari Dinas Parpora yang berpotensi menimbulkan konflik dan pungutan liar. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengelolaan pintu masuk tidak pada jam yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya peran Dinas Parpora dalam melakukan pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau. Pemerintah menetapkan jam operasional tiket masuk dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB. Namun pada saat observasi dilakukan, pemuda tetap meminta uang tiket masuk kepada pengunjung setelah lewat pukul 17.00 WIB hingga larut malam. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata.

“Sebenarnya dari pemerintah itu sudah menetapkan bahwa tiket masuk itu hanya sampai jam 17.00 dan Disparpora juga mengutus 1 (satu) atau 2 (dua) orang staff setiap harinya untuk ikut menjaga gerbang sampai jam yang telah ditentukan, tapi karena pemuda yang menjaga gerbang merasa mereka masyarakat setempat tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat tersebut”. (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Lucky Setiawan, pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024).

Selanjutnya observasi yang dilakukan peneliti terkait peran dan partisipasi masing-masing *stakeholder* dalam kolaborasi pengelolaan kawasan Lembah Harau. Ditemukan bahwa peran dari pokdarwis sebagai salah satu aktor dalam berkolaborasi masih kurang. Pokdarwis berperan dalam hal pemberdayaan masyarakat, namun pokdarwis Lembah Harau belum memberikan peran yang optimal di dalamnya yang ditandai dengan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sekitar kawasan wisata yang masih lemah dalam pengembangan dan pembangunan

kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

“Peran pokdarwis itu belum, belum tampak karena pokdarwis itu berperan dalam pemberdayaan masyarakat tapi ya mana belum ada terlihat, itu yang saat ini dibenahi oleh pemerintah daerah” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 2 September 2024).

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pokdarwis belum menunjukkan peran yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat. Serta Pemerintah Daerah sampai saat ini masih berupaya untuk membenahi hal tersebut agar seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat memberikan peran yang maksimal dalam kolaborasi pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau.

Permasalahan lainnya yang ditemukan peneliti pada observasi awal yakni mengenai komitmen dari para *stakeholder*. Pemerintah membangun kios di lahan milik BKSDA untuk pedagang yang mana berperan sebagai pihak swasta dalam kolaborasi dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bahwasanya pedagang wajib membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemerintah, namun hal itu tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak dari penyewa kios yang tidak membayarkan sewanya kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya komitmen terhadap proses antar *stakeholder* yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya kolaborasi.

Berdasarkan temuan peneliti, saat ini terdapat kurang lebih 75 kios yang berdiri di kawasan wisata Lembah Harau, yang mana terdapat 50 kios yang sudah memiliki

izin resmi dan termasuk kedalam retribusi yang harus dipungut oleh pemerintah, Berikut daftar kios yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah:

Tabel 1.3
Data Kios yang Sudah Memiliki Izin Resmi

No.	Lokasi Kios	Banyak Kios
1	Sarasah Aka Barayun	13
2	Sarasah Bunta	8
3	Sarasah Lului	5
4	Area Penghubung Sarasah Lului dan Sarasah Bunta	14
5	Sarasah Murai	6
6	Taman Bermain Anak	4
Jumlah		50

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Tabel tersebut memperlihatkan distribusi jumlah kios yang memiliki izin resmi dan memberikan retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di beberapa lokasi berbeda. Terdapat 25 kios lainnya yang berdiri ilegal tanpa memberikan retribusi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Retribusi kios tersebut mandat sejak adanya Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya jumlah kunjungan wisatawan ke Lembah Harau, hingga saat ini retribusi kios juga masih belum berjalan sedangkan jumlah kunjungan wisata sudah kembali meningkat.

Selain itu, pertemuan antar *stakeholder* secara keseluruhan yang membahas mengenai pengelolaan objek wisata Lembah Harau ini belum dilaksanakan, pertemuan hanya dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* yang memiliki

kepentingan sehingga menyebabkan komunikasi yang kurang lancar antar seluruh *stakeholder*. kurangnya pertemuan yang diadakan juga menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi oleh para *stakeholder*. Salah satu kendala dari minimnya pertemuan tersebut adalah ketidakcocokan jadwal antar *stakeholder* sebagaimana yang dipertegas juga berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, yaitu :

“Kalau pertemuan seluruh pihak terkait belum ada, karena kita juga harus mencari jadwal yang pas dengan seluruh pihak dan itu bisa dibilang cukup sulit dikarenakan tentu setiap pihak memiliki kesibukan masing-masing” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Syukri Anda, pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau yakni masih belum maksimalnya beberapa variabel *collaborative governance* yaitu pada kondisi awal kolaborasi terkait ketidakseimbangan sumber daya serta variabel proses kolaborasi terkait dialog tatap muka dan komitmen dalam berkolaborasi pada pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau. Kondisi awal dan proses kolaborasi merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan kolaborasi agar tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa rangkaian proses kolaborasi yang telah dilakukan oleh aktor dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau, dapat dilihat bahwa keterlibatan masing-masing aktor belum optimal yang mengakibatkan peran dan kontribusi mereka dalam berkolaborasi belum terlihat secara nyata dan jelas. Hal yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan masing-

masing aktor tersebut dalam proses berkolaborasi yang mana peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash untuk menganalisa hal tersebut, adapun variabel yang digunakan yaitu :

1. Kondisi awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Kelembagaan
4. Proses Kolaborasi

Dilihat dari kondisi awal kolaborasi, kolaborasi berkaitan dengan ketidakseimbangan sumber daya. Dengan itu, masing-masing aktor tentu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkolaborasi. Namun dalam implementasinya pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau dapat dikatakan terjadi ketidakseimbangan sumber daya, dimana masing-masing aktor memiliki kekuatan yang berbeda, namun pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang sama dalam berkolaborasi yaitu untuk mengembangkan kawasan wisata Lembah Harau yang nantinya juga dapat mempengaruhi insentif mereka untuk berpartisipasi.

Selain itu dari segi riwayat konflik dan kerjasama, yaitu latar belakang konflik atau kerjasama antar para pemangku kepentingan yang sangat mempengaruhi kolaborasi. Potensi konflik dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau terletak pada pengelolaan sistem tiket masuk yang masih terdapat pungutan liar. Hal ini dapat menimbulkan konflik antar aktor yang berkolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau.

Variabel selanjutnya dari teori Ansell dan Gash adalah desain kelembagaan yang dilihat dari partisipasi aktor dalam kolaborasi, aturan pelaksanaan dalam berkolaborasi dan transparansi dalam proses berkolaborasi. Dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau para aktor ikut berkontribusi dan berpartisipasi didalamnya. Seperti BKSDA bentuk partisipasinya adalah pengelolaan objek wisata Lembah Harau dari segi hutan konservasi dan hutan lindung. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berperan dalam peningkatan SDM pelaku wisata dan promosi wisata. Swasta yang berperan dalam mencukupi sarana dan prasarana di kawasan wisata. Serta pokdarwis yang berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan dan ikut serta dalam memberikan pengetahuan kepada wisatawan terkait objek wisata Lembah Harau.

Aturan dasar dalam kolaborasi merupakan dasar dalam berkolaborasi oleh para aktor yang terlibat. Namun, dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau belum terdapat aturan dasar yang menunjukkan kolaborasi keseluruhan aktor. Dokumen yang ada hanyalah perjanjian kerjasama antara BKSDA dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk pihak lain itu belum ada aturan secara tertulis.

Selanjutnya kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Adapun pihak yang berperan sebagai pemimpin atau *leading sector* dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Mengenai memfasilitasi dialog, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota belum

memiliki forum yang mempertemukan seluruh pihak yang ikut serta dalam kolaborasi.

Pada proses kolaborasi pertemuan seluruh pihak belum ada dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu oleh masing-masing stakeholder. Dialog dilakukan hanya antara BKSDA dengan Dinas Parpora, kemudian antara Dinas Parpora dengan Pokdarwis. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peran aktor dalam berkolaborasi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya pertemuan antar seluruh aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Selanjutnya dalam hal membangun kepercayaan dan komitmen terhadap proses. Hal ini berkaitan dengan kemampuan masing-masing stakeholder dalam membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen mereka dalam proses kolaborasi agar kolaborasi dapat berjalan dengan lancar. Komitmen antar aktor didukung oleh kesadaran akan tanggung jawab dan kesepakatan yang sudah dibangun antar aktor yang terlibat.

Berdasarkan beberapa rangkaian proses dalam kolaborasi tentu ada hasil sementara yang dapat dilihat dalam kolaborasi yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata Lembah Harau, pencapaian hasil sementara merupakan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Lembah harau yang juga berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu anggota pokdarwis Lembah Harau sebagai berikut:

“Dikarenakan semakin terkenalnya objek wisata Lembah Harau ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi pedagang sekitar objek wisata. Ramainya pengunjung menjadikan aktifitas ekonomi masyarakat juga meningkat, selain itu homestay juga banyak yang terisi”. (Hasil wawancara dengan salah seorang anggota pokdarwis sarbun, Hendra Yenti, pada 27 Agustus 2024)

Penelitian mengenai kolaborasi pada pengelolaan pariwisata ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya namun memiliki fokus dan lokus penelitian yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nadia F. Tangkotow, Welly Waworundeng dan Alfon Kimbal yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratotok⁸. Kemudian penelitian oleh Yoseph Molla, Tjahya Supriatna dan Layla Kurniawati yang membahas tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat⁹. Selain itu juga ada yang melakukan penelitian mengenai objek wisata Lembah Harau yaitu penelitian oleh Deki Yusman, Nursyirwan Effendi dan Ifdal yang membahas tentang Manajemen Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota¹⁰.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara yang mengatakan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dapat dilihat dari perbedaan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh para aktor dalam

⁸ Tangkotow, N. F. dkk. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban Di Kecamatan Ratotok. *Jurnal Governance*. Vol.1, No.1

⁹ Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa(JIPSK)*. Vol.VI, no. 02

¹⁰ Yusman *Op.Cit.*

berkolaborasi¹¹. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arundinasari yang mengatakan bahwa ketidakseimbangan sumber daya sangatlah wajar dalam kolaborasi, namun pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar memiliki strategi agar hal tersebut tidak menjadi suatu masalah¹². Dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata Lembah Harau ini, ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari Pemerintah yang memiliki asset kawasan Taman Bermain Anak, BKSDA yang memiliki kawasan konservasi serta pihak swasta dan masyarakat yang memiliki lahan pribadi yang semuanya termasuk dalam kawasan objek wisata Lembah Harau. Dimana dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi *leading sector* dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau. Dengan demikian pemerintah, BKSDA, swasta dan masyarakat memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Lembah Harau.

Pengkajian mengenai kolaborasi pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, sebagaimana Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki objek wisata Lembah Harau yang perlu dikelola dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai *leading sector* nya. Didukung dengan adanya kolaborasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) provinsi Sumatera Barat, pihak swasta serta masyarakat. *Stakeholder* dituntut untuk berkomitmen dalam pelaksanaan

¹¹ Tamara, Arya. 2023. Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Skill Development Center (SDC) Di Kota Padang. *Tesis*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

¹² Arundinasari, Indira. 2022. Kolaborasi Tata Kelola Kampung Pelangi Kota Surabaya. *Jurnal Publicuho*. Vol.5, No.3

kolaborasi agar tujuan dari kolaborasi pengelolaan objek wisata Lembah Harau dapat berjalan dengan maksimal.

Selain itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan objek wisata Lembah Harau merupakan objek wisata yang sudah populer di Sumatera Barat, sudah mendapatkan penghargaan sebagai daerah pamong wisata berkelanjutan, termasuk kedalam salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota dan memiliki minat kunjungan terbanyak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, peneliti menemukan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pengelolaannya oleh aktor yang terlibat dalam kolaborasi terkait dengan dampak dari pengelolaan yang belum maksimal, seperti kurangnya ketegasan dalam penertiban pembayaran kios oleh pedagang, masih adanya pungutan liar di pintu masuk objek wisata Lembah Harau yang berpotensi konflik, sarana jalan ada yang perlu diperbaiki, dan kurangnya pertemuan *stakeholder* secara keseluruhan yang menyebabkan adanya miss komunikasi antar aktor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BKSDA, swasta dan masyarakat terkait dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang yaitu bagaimanakah *collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam beberapa manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik, dikarenakan penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik yaitu memberikan gambaran terkait *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi oleh peneliti selanjutnya, serta diharapkan dapat bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan upaya pengembangan kawasan wisata Lembah Harau, serta bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kolaborasi dalam bidang lainnya.